

RINGKASAN ISI

KABUPATEN KEBUMEN, 2026. NOTA JAWABAN BUPATI KEBUMEN ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2027

Pemerintah mengakui bahwa tingginya ketergantungan terhadap pendapatan transfer merupakan tantangan kemandirian fiskal dan menyatakan akan memperkuat PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi, digitalisasi pemungutan, optimalisasi aset dan BUMD, serta pengembangan sektor ekonomi potensial tanpa menambah beban berlebihan bagi masyarakat. Pemerintah juga menjelaskan bahwa DAK Fisik belum dicantumkan karena rincian Transfer ke Daerah Tahun 2027 belum ditetapkan Pemerintah Pusat; kebutuhan infrastruktur sementara direncanakan dari sumber lain dan akan disesuaikan apabila alokasi TKD definitif telah diterima.

APBD diarahkan pada hasil yang dirasakan masyarakat, terutama infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, penguatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Beberapa target yang dijelaskan antara lain penanganan jalan sekitar 52 km, jaringan irigasi sekitar 5,1 km, rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP, serta target UHC 2027 sebesar 99,07%. Pemerintah juga menargetkan pengembangan UMKM tidak hanya melalui jumlah peserta, tetapi pada peningkatan kelas usaha, omzet, lapangan kerja dan perluasan pasar. Aspirasi masyarakat melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD disebut akan diverifikasi dan disinkronkan dengan dokumen perencanaan serta kemampuan fiskal melalui SIPD.

Terkait pembiayaan, defisit RAPBD 2027 sebesar sekitar Rp75,23 miliar ditutup melalui pembiayaan, sementara proyeksi SiLPA 2026 sebesar sekitar Rp109,67 miliar masih bersifat perkiraan dan akan disesuaikan setelah realisasi akhir diketahui. Proyeksi tersebut antara lain berasal dari pelampauan PAD dan efisiensi belanja. Pemerintah menyatakan penggunaan SiLPA akan dilakukan secara hati-hati dan tidak diarahkan menjadi kebiasaan akibat rendahnya penyerapan anggaran. Jawaban juga menegaskan bahwa pembahasan RAPBD masih dapat mengalami penajaman bersama DPRD sebelum ditetapkan, termasuk penyesuaian terhadap program, prioritas, dan alokasi apabila diperlukan.

Catatan:

- Nota Jawaban disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen pada Jumat, 11 September 2026.
- Dokumen memuat jawaban Pemerintah Daerah kepada 7 fraksi DPRD Kabupaten Kebumen: Fraksi Golkar Demokrat, Fraksi Partai NasDem, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Amanat Sejahtera, Fraksi PPP, Fraksi PKB, dan Fraksi Partai Gerindra.
- Dokumen ditandatangani oleh Bupati Kebumen Hj. Lilis Nuryani.
- Dokumen terdiri atas 46 halaman,

SUMMARY

KEBUMEN REGENCY, 2026. REGENT'S RESPONSE TO THE FACTIONS' GENERAL VIEWS ON THE DRAFT 2027 REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET

The main issues covered include fiscal independence, optimization of Regional Own-Source Revenue, the structure and quality of expenditure, deficit financing, the use of SiLPA, basic public services, infrastructure development, poverty reduction, economic empowerment, and the integration of DPRD Pokok-Pokok Pikiran into regional planning and budgeting. Efforts to strengthen Regional Own-Source Revenue are directed toward the intensification and extensification of local taxes and levies, digitalization of revenue collection, optimization of regional assets and regional-owned enterprises, and development of potential economic sectors without placing excessive burdens on the public. Physical Special Allocation Funds for 2027 have not yet been allocated because the definitive Transfer to Regions allocation has not been determined by the Central Government.

Regional expenditure is directed toward programs that provide direct benefits to the public, particularly basic infrastructure, education, health, poverty reduction, economic empowerment, and job creation. Targets stated in the document include the handling of approximately 52 km of roads, around 5.1 km of irrigation networks, rehabilitation of primary and junior secondary school classrooms, and a Universal Health Coverage target of 99.07 percent in 2027. MSME development programs are directed toward business upgrading, increased turnover, job creation, and market expansion. Public aspirations conveyed through DPRD Pokok-Pokok Pikiran are positioned as part of the planning process and are subject to verification and alignment with the RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, development priorities, technical readiness, and regional fiscal capacity.

Financing for the Draft 2027 Regional Budget includes a projected deficit of approximately Rp75.23 billion and a projected 2026 SiLPA of approximately Rp109.67 billion. The SiLPA figure remains a projection derived, among other sources, from potential excess Regional Own-Source Revenue and expenditure efficiency, and will be adjusted once the final realization for Fiscal Year 2026 is known. The document also emphasizes performance-based budgeting, efficiency in operational expenditure, stronger allocation toward spending that directly benefits the public, budget transparency, and further refinement of programs and allocations during deliberations with the DPRD.

Note:

- *The Response Note was presented at the DPRD Kebumen Regency plenary meeting on 11 September 2026.*
- *The document contains responses to the General Views of seven DPRD factions.*
- *The document is signed by Regent of Kebumen Hj. Lilis Nuryani.*
- *The document consists of 46 pages,*